



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 74**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
BANYURESMI TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada rencana kerja tahun 2022 adalah suatu proses penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber yang ada dalam rangka “*Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat*”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Banyuresmi sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Banyuresmi telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena

merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan ¹dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Banyuresmi tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
31. Keputusan Camat Banyuresmi Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi tahun 2021 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Banyuresmi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi tahun 2021 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Banyuresmi;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja SKPD.

1.3.2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1. Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Perkiraan Capaian tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Banyuresmi sudah disahkan.

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Kecamatan Banyuresmi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Banyuresmi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Banyuresmi;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyuresmi, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Banyuresmi.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu

Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyuresmi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyuresmi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuresmi selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banyuresmi Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - 3) Pengadaan Interior Ruang Kantor
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD
4. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)

- 2) Kegiatan Penyusunan RPTK
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan Capaian tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 2 (dua) Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik prosentase realisasi keuangan 73,51% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp.8.821.198,-
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional prosentase realisasi 86,28% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 2.588.400,-
- Penyediaan alat tulis kantor prosentase realisasi 99,71% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 57.958.950,- terealisasi Rp. 57.791.487,-
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor prosentase realisasi 99,99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 49.785.000,- terealisasi Rp. 49.780.000,-
- Rapat-rapat konsultasi keluar daerah prosentase realisasi 91,57% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.145.000,- terealisasi Rp. 2.880.000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi 88,94% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 503.067.450,- terealisasi Rp. 447.432.200,-
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kecamatan prosentase realisasi 37,43% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 18.714.000,-

c. Program perencanaan dan pelaporan keuangan

- Kegiatan pelaporan keuangan prosentase realisasi 99,71% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.815.000,- terealisasi Rp. 6.795.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi
Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	8.821.198	73,51
2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	3.000.000	2.588.400	86,28
3	Penyediaan alat tulis kantor	57.958.950	57.791.487	99,71
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.785.000	49.780.000	99,99
5	Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	3.145.000	2.880.000	91,57
6	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	503.067.450	447.432.200	88,94
7	Kegiatan Pembangunan Gedung Kecamatan	50.000.000	18.714.000	37,43
8	Kegiatan pelaporan keuangan prosentase	6.815.000	6.795.000	99,38

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.815.800,- terealisasi Rp. 16.815.800,-
 - b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,-
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.560.500,- terealisasi Rp. 20.560.500,-
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.010.400,- terealisasi Rp. 4.010.400,-
 - e. Penyediaan peralatan rumah tangga prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.044.200,- terealisasi Rp. 4.044.200,-
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.496.000,- terealisasi Rp. 5.496.000,-
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.800.000,- terealisasi Rp. 20.800.000,-
 - h. Rapat-Rapat Konsultasi ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.000.000,- terealisasi Rp. 16.000.000,-
 - i. Pengadaan Mebeulair prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.861.500,- terealisasi Rp. 9.861.500,-

- j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 17.785.000,- terealisasi Rp. 17.785.000,-
- k. Pegadaan pakaian olah raga prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.500.000,- terealisasi Rp. 10.500.000,-
- l. Penyusunan dokumen perencanaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.254.000,- terealisasi Rp. 7.254.000,-
- m. Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.570.000,- terealisasi Rp. 4.570.000,-
- n. Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 21.585.000,- terealisasi Rp. 21.585.000,-
- o. Penyusunan RPTK Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,-
- p. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.850.000,- terealisasi Rp. 2.850.000,-
- q. Penyelenggaraan Upacara hari besar dan Nasional dan Upacara/acara lainnya prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.745.000,- terealisasi Rp. 15.745.000,-
- r. Penyelenggaraan kegiatan TP-PKK Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.375.000,- terealisasi Rp. 9.375.000,-
- s. Monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.355.000,- terealisasi Rp. 2.355.000,-
- t. Pengelolaan sampah prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 125.000.000,- terealisasi Rp. 125.000.000,-

- u. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.315.000,- terealisasi Rp. 3.315.000,-
- v. Penerapan dan penegaakan PERDA prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.680.000,- terealisasi Rp. 3.680.000,-
- w. Monitoring Program BPNT prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.610.000,- terealisasi Rp. 3.610.000,-
- x. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 28.500.000,- terealisasi Rp. 28.500.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Nama Program/Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor:	16.815.800	16.815.800	100
2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000	5.000.000	100
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:	20.560.500	20.560.500	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.010.400	4.010.400	100
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.044.200	4.044.200	100

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	5.496.000	5.496.000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman:	20.800.000	20.800.000	100
8	Rapat-Rapat Konsultasi ke Dalam Daerah:	16.000.000	16.000.000	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Mebeulair	9.861.500	9.861.500	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.785.000	17.785.000	100
III	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			
1	Pegadaan pakaian olah raga	10.500.000	10.500.000	100
IV	Program Perencanaan dan Pelaporan keuangan			
1	Penyusunan dokumen perencanaan	7.254.000	7.254.000	100
V	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
1	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	4.570.000	4.570.000	100
2	Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat kecamatan	21.585.000	21.585.000	100
3	Penyusunan RPTK Kecamatan	12.000.000	12.000.000	100
4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	2.850.000	2.850.000	100
5	Penyelenggaraan Upacara hari besar dan Nasional dan Upacara/acara lainnya	15.745.000	15.745.000	100
6	Penyelenggaraan kegiatan TP-PKK Tingkat Kecamatan	9.375.000	9.375.000	100
7	Monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan	2.355.000	2.355.000	100
8	Pengelolaan sampah	125.000.000	125.000.000	100

9	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	3.315.000	3.315.000	100
10	Penerapan dan penegaakan PERDA	3.680.000	3.680.000	100
11	Monitoring Program BPNT	3.610.000	3.610.000	100
VI	Program pelayanan Administrasi perkantoran Terpadu (PATEN)			
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	28.500.000	28.500.000	100
	Jumlah	370.712.400	370.712.400	

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Banyuresmi pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Banyuresmi.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra SKPD Kecamatan Banyuresmi merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Banyuresmi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Banyuresmi yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	J	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	102.16	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	CC	100.00	
						Kondisi Akhir (F)			CC	100.00

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Banyuresmi tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Banyuresmi. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Banyuresmi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Banyuresmi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)			
7.													
7.	01.												
7.	01.	30	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	251,985,400	245,828,832	218.615.850	214.587.985	99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.389.192.700	22,69
7.	01.	30	01.002	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet	20,400,000	15,600,000	12.000.000	8.821.198	74	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.174.600	
7.	01.	30	01.004	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pembayaran STNK	950,000	950,000	3.000.000	2.588.400	87	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.174.600	49,75
7.	01.	30	01.006	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	20,950,000	20,950,000	16.815.800	16.815.800	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.175.387.300	

7.	01.	30	01.007	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3,500,000	3,500,000	500.000	500.000	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.161.302.900	48,17
7.	01.	30	01.008	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	42,744,400	42,744,400	57.958.950	57.791.487		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.084.400	36,94
7.	01.	30	01.009	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	8,138,000	8,138,000	20.500.000	20.500.000	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.053.400	
7.	01.	30	01.010	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,596,000	6,596,000	4.010.400	4.010.400	100	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.053.400	100
7.	01.	30	01.011	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	-	-	49.785.000	49.780.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
7.	01.	30		Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang memadai	44,437,275	44,437,275	4.044.200	4.044.200	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.589.660	
7.	01.	30	01.013	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar koran/majalah			5.496.000	5.496.000	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.090.900	100
7.	01.	30	01.015	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	39,600,000	39,600,000	20.800.000	20.800.000	100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.559.860	55,25
7.	01.	30	01.019	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	26,160,000	26,160,000	3.145.000	2.880.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.119.100	49,02

7.	01.	30	01.019	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan keluar daerah	-	-	16.000.000	16.000.000	100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.125.400	50,02
7.	01.	30	02.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana	30,894,000	30,894,000	503.067.450	447.432.200	89	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.874.400	50
	01	02	02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang memadai			425.420.950	401.071.700	95	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.960.000	50
	01	02	02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung	36,449,425	36,449,425				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.860.000	36,25
7.	01.	30	02.006	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeulair yang memadai	31,269,500	31,269,500	9.861.500	9.861.500	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.936.000.000	
7.	01.	30	02.008	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumdin yang memadai	10,007,500	10,007,500				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
7.	01.	30	02.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang memadai	14,074,200	14,074,200	17.785.000	17.785.000	100	Pengadaan Mebel		
7.	01.	30	02.011	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional layak pakai	10,500,000	10,500,000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
7	01	02	02.035	Pengadaan Tanah Kantor Polsek	jumlah gedung yang memadai	900,000,000	900,000,000				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.936.000.000	
7.	01.	30	02.180	Pembangunan kantor kecamatan	Jumlah bangunan kantor yang memadai			500.000.000	18.714.000	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
7	01.	30	03.	Program kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			10.500.000	10.500.000	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	43.997.740	

											Pemerintahan Daerah		
8	01.	30	03.1	Pengadaan pakaian batik nasional	Jumlah pakaian batik yang memadai						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.021.840	28,61
8	01.	30	03.2	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pakaian olah raga yang memadai			10.500.000	10.500.000	100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.630.000	18,61
7	01	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja aparatur			14.069.000	14.096.000	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.343.900	40,25
7	01	02	06.021	Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan			6.815.000	6.815.000	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.990.000	
7	01	02	06.026	Penyusunan dokumen keuangan	Jumlah dokumen keuangan			7.254.000	7.254.000	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.740.000	9
7.	01.	30	79.	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Meningkatnya kinerja aparatur	28,333,000	28,333,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.150.000	19,64
7.	01.	30	79.001	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara - Upacara Lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan upacara/acara lainnya	15,368,200	15,368,200				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.100.000	
7	01	02	79.015								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		

											Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
7.	01.	30	82.	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kinerja aparatur	97,710,600	97,710,600	204.085.000	204.085.000	100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
7.	01.	30	82.004	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (DID)	Jumlah Pembinaan Hansip	13,634,000	13,634,000	3.315.000	3.315.000	100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		
				Pembinaan Teknis pelaksanaan perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan	jumlah desa yang mengikuti lomba desa	10,775,000	10,775,000	4.570.000	4.570.000	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.668.300	40,15
7.	01.	30	82.019	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan.	Jumlah Kolektor PBB	25,584,600	25,584,600	21.585.000	21.585.000	100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.301.100	25,55
7.	01.	30	82.073	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK Kecamatan	12,783,600	12,783,600	12.000.000	12.000.000	100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		25,55
7.	01.	30	79.004	Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Desa (PKK)	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	-	-	9.375.000	9.375.000	100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.301.100	25,55
7	01	02	202	Pembinaan Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	jumlah desa yang dibina	8,434,000	8,434,000				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	187.367.200	54,11
7	01	02	202 .1	Pembinaan Kelembagaan Desa	jumlah desa yang dibina	7,875,000	7,875,000				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		

7	01	02	202.2	monitoring dan pembinaan aparaturn pemerintah desa/kelurahan	jumlah desa yang berkinerja baik	14,834,500	14,834,500				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	187.367.200	54,11
7	01	03		Kegiatan Pemberdayan Masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan	8,031,000	8,031,000				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.704.700	69,97
7	01	03	201	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan			21.585.000	21.585.000	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.986.500	100
7	01	03	201.1	Penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan dan upacara/acara lainnya kecamatan terpadu	Jumlah kegiatan Upacara hari besar			15.745.000	15.745.000	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	14.986.500	100
7	01	03	201.3	Monitoring kegiatan pembangunandi wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan monitoring			2.355.000	2.355.000	100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7	01	03	202	Pengelolaan sampah kecamatan	Jumlah petugas pengelola sampah			12.500.000	12.500.000	100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.718.200	44,58
7	01	03	202.2	Penerapan dan penegakan perda tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan patroli			3.680.000	3680.000	100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17.718.200	44,58
7	01	03	202.4	Monitoring program BPNT	Jumlah kegiatan monitoring			3.610.000	3.610.000	100	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
7	01	04		Program pelayanan administrasi terpadu	Jumlah kegiatan pelayanan			28.500.000	28.500.000	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	137.475.700	29
7	01	04	201	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan pelayanan			28.500.000	28.500.000	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.475.500	45,61

7	01	04	201.1								Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.475.500	45,61
7	01	04	201.2								Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
7	01	04	202								Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.200	0
7	01	04	202.1								Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.000.200	0
7	01	05									PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.100	32,87
7	01	05	201								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.100	32,87
7	01	04	201.1								Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan		

											Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	04	201.2								Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
7	01	04	201.8								Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.100	32,87
7	01	06									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
7	01	06	201								Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
7	01	04	201.2								Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
7	01	04	201.12								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Banyuwangi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SKM			80,69	81	81,5	82	82,5	80,69		81	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			85	90	90	95	95	85		90	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			80	85	90	95	100	80		85	
4	Nilai/Predikat SAKIP			cc	b	b	bb	bb	cc		b	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuwangi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuresmi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Banyuresmi.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp. 5.126.041.500,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Banyuresmi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2021 Kecamatan Banyuresmi mengusulkan 6 (enam) Program dengan 40 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Banyuresmi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel TC-31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021 Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Banyuresmi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banyuresmi	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		4.389.192.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banyuresmi	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		4.389.192.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja		11.174.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja		11.174.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyuresmi	jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	11.174.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyuresmi	jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	11.174.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		2.175.387.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		2.175.387.300	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banyuresmi	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.161.302.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banyuresmi	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.161.302.900	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyuresmi	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.084.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyuresmi	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.084.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian		11.053.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian		11.053.400	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banyuresmi	jumlah pakaian dinas	35 Orang	11.053.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banyuresmi	jumlah pakaian dinas	35 Orang	11.053.400	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banyuresmi	jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banyuresmi	jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5 orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Umum		161.589.660	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Umum		161.589.660	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyuresmi	jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	12 item	6.090.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyuresmi	jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	12 item	6.090.900	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyuresmi	jumlah peralatan dan peralatan kantor	13 jenis	71.559.860	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyuresmi	jumlah peralatan dan peralatan kantor	13 jenis	71.559.860	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banyuresmi	jumlah peralatan Rumah Tangga yang memadai	8 item	6.119.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banyuresmi	jumlah peralatan Rumah Tangga yang memadai	8 item	6.119.100	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyuresmi	jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	2 jenis	20.125.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyuresmi	jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	2 jenis	20.125.400	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyuresmi	jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	730 exemplar	4.874.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyuresmi	jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	730 exemplar	4.874.400	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyuresmi	jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	1 kegiatan	24.960.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyuresmi	jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	1 kegiatan	24.960.000	

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyuresmi	jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait serta desa	186 OH	27.860.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyuresmi	jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait serta desa	186 OH	27.860.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyuresmi	Jumlah barang milik daerah		1.936.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyuresmi	Jumlah barang milik daerah		1.936.000.000	
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyuresmi	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang memadai	4 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyuresmi	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang memadai	4 unit		
14	Pengadaan Mebel	Banyuresmi	jumlah meubeulair yang memadai	9 jenis		Pengadaan Mebel	Banyuresmi	jumlah meubeulair yang memadai	9 jenis		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung	1 paket		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung	1 paket		
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah bangunan puskesmas sukasenang	1 unit	1.936.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah bangunan puskesmas sukasenang	1 unit	1.936.000.000	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah gedung KB	1 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah gedung KB	1 unit		
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah tanah untuk alun-alun	1 ha		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah tanah untuk alun-alun	1 ha		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		43.997.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		43.997.740	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyuresmi	jumlah pembayaran rekening air dan listrik dan internet	12 bulan	12.021.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyuresmi	jumlah pembayaran rekening air dan listrik dan internet	12 bulan	12.021.840	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyuresmi	jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	8 item	7.630.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyuresmi	jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	8 item	7.630.000	

21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banyuresmi	jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	24.343.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banyuresmi	jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	24.343.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		49.990.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		49.990.000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyuresmi	Jumlah pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan	8 item	20.740.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyuresmi	Jumlah pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan	8 item	20.740.000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyuresmi	jumlah pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan operasional	1 unit	24.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyuresmi	jumlah pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan operasional	1 unit	24.150.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	5.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	5.100.000	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah pembangunan puskesmas	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyuresmi	jumlah pembangunan puskesmas	1 unit		
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		366.668.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		366.668.300	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		179.301.100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		179.301.100	
29	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan			

30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	jumlah aparaturnya desa yang dibina jumlah kolektor PBB jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan desa jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa jumlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara lainnya kegiatan kepemudaan dan olah raga	4 Desa 140 orang 4 Desa 4 Desa 1 Desa 2 kali 1 kegiatan	179.301.100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	jumlah aparaturnya desa yang dibina jumlah kolektor PBB jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan desa jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa jumlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara lainnya kegiatan kepemudaan dan olah raga	4 Desa 140 orang 4 Desa 4 Desa 1 Desa 2 kali 1 kegiatan	179.301.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan		187.367.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan		187.367.200	
31	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan	12 laporan		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan	12 laporan		
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah kegiatan pelayanan	1 kegiatan	187.367.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah kegiatan pelayanan	1 kegiatan	187.367.200	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banyuresmi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		32.704.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banyuresmi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		32.704.700
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		14.986.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		14.986.500
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan RPTK	1 kegiatan	14.986.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan RPTK	1 kegiatan	14.986.500
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	Prosentase masyarakat yang dapat di berdayakan	12 Kali		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	Prosentase masyarakat yang dapat di berdayakan	12 Kali	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		17.718.200	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyuresmi	Jumlah Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		17.718.200
35	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	17.718.200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	17.718.200
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung (silo)	1 unit		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung (silo)	1 unit	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Banyuresmi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		137.475.700	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Banyuresmi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		137.475.700
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		87.475.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		87.475.500

37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1 kegiatan	87.475.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1 kegiatan	87.475.500
38	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	1 kegiatan		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	1 kegiatan	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah		50.000.200	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah		50.000.200
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan patroli	1 kegiatan	50.000.200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan patroli	1 kegiatan	50.000.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Banyuresmi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		200.000.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Banyuresmi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		200.000.100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banyuresmi	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		200.000.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banyuresmi	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		200.000.100
40	Pembinaan Wawasan	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan	2 kali		Pembinaan Wawasan	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan	2 kali	

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pembinaan wawasan kebangsaan			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pembinaan wawasan kebangsaan			
41	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Banyuresmi	Jumlaj pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek	2 kali		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Banyuresmi	Jumlaj pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek	2 kali		
42	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 kegiatan	200.000.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 kegiatan	200.000.100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Banyuresmi	Persentase Desa Berkinerja Baik			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Banyuresmi	Persentase Desa Berkinerja Baik			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Banyuresmi	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Banyuresmi	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

43	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi	12 kali		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi	12 kali		
44	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Banyuresmi	Jumlah fasilitasi kegiatan	15 Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Banyuresmi	Jumlah fasilitasi kegiatan	15 Kegiatan		
45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Banyuresmi	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Banyuresmi	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen		
46	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Banyuresmi	jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 Desa		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Banyuresmi	jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 Desa		
47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah peningkatan kualitas jalan kh.hasan arief	10 km		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Banyuresmi	jumlah peningkatan kualitas jalan kh.hasan arief	10 km		
					5.126.041.500					5.126.041.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Banyuresmi melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Banyuresmi mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Banyuresmi

No.	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa	Kecamatan			
1	2	3		4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagendit	Banyuresmi	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.389.192.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	11.174.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagendit	Banyuresmi	jumlah dokumen perencanaan	11.174.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2.175.387.300	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.161.302.900	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Bagendit	Banyuresmi	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	14.084.400	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	11.053.400	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pakaian dinas	11.053.400	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Dokumen Adminitrasi Umum	161.589.660	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagendit	Banyuresmi	jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	6.090.900	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagendit	Banyuresmi	jumlah peralatan dan peralatan kantor	71.559.860	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagendit	Banyuresmi	jumlah peralatan Rumah Tangga yang memadai	6.119.100	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	20.125.400	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	4.874.400	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagendit	Banyuresmi	jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	24.960.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagendit	Banyuresmi	jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait serta desa	27.860.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah barang milik daerah	1.936.000.000	
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang memadai		
14	Pengadaan Mebel	Bagendit	Banyuresmi	jumlah meubeulair yang memadai		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung		
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah bangunan puskesmas sukasenang	1.936.000.000	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah gedung KB		
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah tanah untuk alun-alun		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	43.997.740	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pembayaran rekening air dan listrik dan internet	12.021.840	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagendit	Banyuresmi	jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	7.630.000	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagendit	Banyuresmi	jumlah jasa kebersihan kantor	24.343.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	49.990.000	

22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan	20.740.000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan operasional	24.150.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah gedung kantor yang terpelihara	5.100.000	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pembangunan puskesmas		
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik		
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik		
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	366.668.300	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Laporan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.301.100	
29	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan		

30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah aparatur desa yang dibina jumlah kolektor PBB jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan desa jumlah pelaksanaan jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa jumlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara lainnya kegiatan kepemudaan dan olah raga	179.301.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan	187.367.200	
31	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Laporan		
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah kegiatan pelayanan	187.367.200	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	32.704.700	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	14.986.500	
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan RPTK	14.986.500	
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	Prosentase masyarakat yang dapat di berdayakan		

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	17.718.200	
35	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	17.718.200	
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pengolahan jagung (silo)		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	137.475.700	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	87.475.500	
37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	87.475.500	
38	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah	50.000.200	
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan patroli	50.000.200	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	200.000.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bagendit	Banyuresmi	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	200.000.100	
40	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan		
41	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Bagendit	Banyuresmi	Jumlaj pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek		
42	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	200.000.100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Bagendit	Banyuresmi	Persentase Desa Berkinerja Baik		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
43	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi		
44	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah fasilitasi kegiatan		

45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Bagendit	Banyuresmi	Jumlah Dokumen RPTK		
46	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bagendit	Banyuresmi	jumlah desa yang mengikuti lomba desa		
47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Bagendit	Banyuresmi	jumlah peningkatan kualitas jalan kh.hasan arief		
					5.126.041.500	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Banyuresmi guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Penanggulangan Kemiskinan
- e. Ketahanan Pangan
- f. Infrastruktur
- g. Iklim Investasi dan iklim usaha
- h. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
- i. Kebudayaan
- j. Kreativitas dan inovasi
- k. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
- l. Perekonomian
- m. Kesejahteraan rakyat
- n. Percepatan Penanggulangan Covid-19

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Banyuresmi di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa

program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Banyuresmi mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022 adalah :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai/Predikat SAKIP

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja
Kecamatan Banyuresmi
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	2	3	4	8
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Nilai SKM	81,5
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	90
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	90%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/Predikat SAKIP	b

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Banyuresmi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Banyuresmi sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Banyuresmi diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Banyuresmi merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Banyuresmi diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Banyuresmi. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banyuresmi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Banyuresmi sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkung.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Banyuresmi melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Banyuresmi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Banyuresmi dan mencakup semua Desa.

5. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.926.847.900,-.

Adapun Program Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (PATEN)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini

TC-33																	
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Banyuwesmi Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023																	
Nama SKPD : Kecamatan Banyuwesmi																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01																
7	01	01															
7	01	01	2,01														
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	jumlah dokumen perencanaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Banyuwesmi , Bagendit	100 %	1 dokumen	100 %	11.174.600	Dana Transfer Unum- Dana Alokasi Unum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	100 %	11.733.330
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan administrasi keuangan	Kab. Garut, Banyuwesmi , Bagendit	100,00 %	1 Tahun	100 %	2.161.302.900	Dana Transfer Unum- Dana Alokasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	2.269.368.045
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan administrasi keuangan	Kab. Garut, Banyuwesmi , Bagendit	100,00 %	1 laporan	100 %	12.584.200	Dana Transfer Unum- Dana Alokasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	13.213.410
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	jumlah pakaian dinas	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Banyuwesmi , Bagendit	100,00 %	35 Orang	100 %	12.250.000	Dana Transfer Unum- Dana Alokasi	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00 %	12.862.500

7	01	01	2.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	5 orang	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								188.695.150				198.129.908
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan	90 %	12 item	100 %	7.774.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	8.163.225
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah peralatan dan peralatan kantor	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	13 jenis	100 %	91.265.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	95.829.090
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah peralatan Rumah Tangga yang memadai	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	8 item	100 %	7.522.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	7.898.310
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	2 jenis	100 %	21.482.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	22.556.363
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	730 exemplar	100 %	4.610.400		Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	4.840.920
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	1 kegiatan	100 %	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	25.200.000

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait serta desa	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	186 OH	100 %	32.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	33.642.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								587.304.370				616.669.589
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	4 unit	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	78.750.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah meubelair yang memadai	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	9 jenis	100 %	126.985.525	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	133.334.801
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah pengolahan jagung	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Karyamukti	100,00 %	1 paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	0
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah bangunan puskesmas sukasenang	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	0

7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah gedung KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	0
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah tanah untuk alun-alun	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengadaan milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	1 ha	100 %	385.318.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	404.584.787
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48.975.980				51.424.779	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah pembayaran rekening air dan listrik dan internet	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	12 bulan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	12.600.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	8 item	100 %	7.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	8.011.500
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	90 %	12 bulan	100 %	29.345.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	30.813.279
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							93.439.000				98.110.950	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	8 item	100 %	20.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	21.777.000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100,00 %	1 paket	100 %	49.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	52.498.950
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	jumlah pembangunan puskesmas	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Sukasenang	100,00 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100,00 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							299.206.800				307.867.140	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							99.995.000					104.994.750
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	jumlah aparatur desa yang dibina jumlah kolektor PBB jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan desa jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa jumlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara lainnya kegiatan kepemudaan dan olah raga	jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	4 Desa 140 orang 4 Desa 1 Desa 2 kali 1 kegiatan	100 %	99.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	104.994.750

7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						193.211.800				202.872.390		
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	12 laporan	100 %	47.124.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	49.480.515
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	jumlah kegiatan pelayanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	100 %	146.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	153.391.875
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						71.377.100				74.945.955		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						71.377.100				74.945.955		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah pelaksanaan kegiatan RPTK	jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	14.698.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.432.900
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persentase masyarakat yang dapat di berdayakan	jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	12 Kali	100 %	56.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	59.513.055
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0				0		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %	0

7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jumlah pengolahan jagung (silo)	jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								116.660.900			122.493.945	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								116.660.900			122.493.945	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	86.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	90.510.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	30.460.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	31.983.945
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								0			0	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah pelaksanaan patroli	Jumlah pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan perda	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	0
7	01	05											257.050.100			269.902.605	

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								257.050.100					269.902.605
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	2 kali	100 %	7.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		7.402.500
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	2 kali	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		52.500.000
7	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 kegiatan	100 %	200.000.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		210.000.105

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						72.826.800					76.468.140	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						72.826.800					76.468.140	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	12 kali	12 BULAN	41.384.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	48.482.040
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah fasilitasi kegiatan	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	18 Kegiatan	12 BULAN	16.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17.602.200
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen RPTK	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 Dokumen	12 BULAN	14.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15.482.500
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	jumlah desa yang mengikuti lomba desa	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	1 Desa	12 BULAN	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	0
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	jumlah peningkatan kualitas jalan kh. hasan arief	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	10 km	12 BULAN	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	0
TOTAL											3.926.847.900					4.123.190.295	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 15 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sebesar Rp. 3.926.847.900, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah

Masukan : APBD 2021 Rp. 11.174.600,-

Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Masukan : APBD 2021 Rp. 2.186.102.402,-

Keluaran : Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Masukan : APBD 2022 Rp. 2.186.102.402,-

Keluaran : Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

c. Administrasi umum perangkat daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 7.774.500,-

Keluaran : Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai

- Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Masukan : APBD 2022 Rp. 112.840.895,-
Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
Masukan : APBD 2022 Rp. 7.522.200,-
Keluaran : Jumlah peralatan rumah tangga yang memadai
Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan : APBD 2022 Rp. 21.482.250,-
Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan
Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan : APBD 2022 Rp. 4.610.400,-
Keluaran : Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan
Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 6) Fasilitasi kunjungan tamu
Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
Keluaran : Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan
Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Masukan : APBD 2022 Rp. 4.610.400,-

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait serta Desa

Hasil : Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

d. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel

Masukan : APBD 2022 Rp. 29.004.575,-

Keluaran : Jumlah mebelair yang memadai

Hasil : Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

e. Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah

1) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Masukan : APBD 2022 Rp. 12.000.000,-

Keluaran : Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 7.630.000,-

Keluaran : Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Masukan : APBD 2022 Rp. 29.345.980,-

Keluaran : Jumlah jasa kebersihan kantor

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 20.740.000,-

- Keluaran : Jumlah pembayaran STNK, Jumlah service kendaraan
- Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 24.968.000,-
- Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan operasional.
- Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
- 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 25.429.000,-
- Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara.
- Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
- Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- Masukan : APBD 2022 Rp. 8.885.000,-
- Keluaran : Jumlah aparatur desa yang di bina, jumlah kolektor PPB, jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT,
- Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring Pembangunan desa,
Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa
Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional

Dan Upacara / Acara lainnya kegiatan kepemudaan dan olah raga.

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan.

Masukan : APBD 2022 Rp. 47.124.300,-

Keluaran : Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah.

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah.

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2) Peningkatan Efektifitas Pelaksaaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Masukan : APBD 2022 Rp. 146.087.500,-

Keluaran : Jumlah kegiatan pelayanan

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah.

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 4.535.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaa kegiatan RPTK

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2) Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 27.389.100,-

Keluaran : prosentase masyarakat yang dapat di berdayakan.

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEGIATAN UMUM

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 94.800.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Hasil : Jumlah gangguan trantibum yang di tangani

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Masukan : APBD 2022 Rp. 17.020.900,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan

Hasil : Jumlah gangguan trantibum yang di tangani

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

1) Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Masukan : APBD 2022 Rp. 8.345.000,-

Keluaran : Jumlah jumlah pelaksanaan patroli

Hasil : Jumlah pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan perda

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masukan : APBD 2022 Rp. 23.126.700,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

- 2) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Masukan : APBD 2022 Rp. 34.260.000,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/bimtek

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

- 3) Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 150.000.200,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Hasil : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggraan urusan pemerintahan umum

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 47.177.700,-

Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi

Hasil : Jumlah pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Desa

2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 16.764.000,-

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Kegiatan

Hasil : Jumlah pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Desa

3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masukan : APBD 2022 Rp. 11.388.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK

Hasil : Jumlah pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pencapaian : Meningkatnya kinerja aparatur Desa

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Banyuresmi. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Banyuresmi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Banyuresmi

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Banyuresmi. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyuresmi ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN